

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

17+8 Tuntutan Rakyat adalah 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang diajukan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Topik ini diluncurkan oleh beberapa *influencer* media sosial yang mengunggah konten berjudul "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati" di akun *Instagram* mereka pada minggu malam, 31 Agustus 2025. Banyak dari *influencer* yang membagikan unggahan ini, antara lain adalah Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS Khairen, Cania Citta, Fathia Izzati, dan Abigail Limuria. Uggahan ini menyusul tanggapan dari aksi protes yang terjadi di Indonesia, yang memunculkan berbagai tuntutan. 17+8 Tuntutan Rakyat merangkum beberapa aspirasi dan dorongan yang telah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. (Kompas.com, 2025)

Demonstrasi besar-besaran ini dimulai pada hari Senin, 25 Agustus 2025. Aksi protes ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk perorangan, mahasiswa, pedagang, pengemudi ojek *online*, sampai mahasiswa. Para demonstran secara terbuka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu tuntutan utama mereka adalah mengenai kenaikan tunjangan anggota parlemen. Para demonstran juga menuntut pembatalan tunjangan perumahan, transparansi gaji, dan

pembatalan rencana kenaikan gaji. Ketegangan meningkat pada senin siang. Situasi semakin memburuk, dan massa terpaksa bubar di depan gedung DPR. (Bestari, 2025).

Hari Kamis, 28 Agustus 2025, serikat pekerja menggelar demonstrasi dengan menuntut enam hal: penghapusan *outsourcing*, penolakan upah rendah, penghapusan PHK, percepatan pembahasan UU Ketenagakerjaan, RUU Perampasa Aset, serta revisi UU Pemilu. Demonstrasi berlangsung damai, dan para pengunjuk rasa bubar sekitar pukul 12.00 siang. Namun, sekelompok mahasiswa dan pelajar berseragam berkumpul di dekat gedung DPR. Mereka menuntut pembubaran DPR dan penghapusan tunjangan anggota dewan yang dianggap berlebihan, yakni sebesar Rp100 juta per bulan. Demonstrasi di depan gedung DPR/MPR tersebut berujung ricuh. (Mardianti, 2025)

Situasi memanas ketika sebuah kendaraan taktis milik Brigade Mobil (Brimob) menabrak Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek *online* berusia 21 tahun di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat. Kematian Affan memicu gelombang amarah masyarakat. Para pengemudi ojek segera menuju Markas Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat. Aksi protes berlanjut keesokan harinya dan meluas ke beberapa kota di Indonesia, termasuk Bandung, Makassar, dan Surabaya. (Mardianti, 2025)

Melalui video yang tersebar luas, sebuah kendaraan rantis menabrak seorang pengemudi ojek *online*. Massa yang marah

berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Alih-alih berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dua orang, keduanya pengemudi ojek, tewas. Satu orang luka-luka dan dirawat di rumah sakit, sementara yang lainnya meninggal dunia. Pengemudi yang tewas bernama Affan Kurniawan. Ia tidak hadir di lokasi untuk berpartisipasi dalam protes; ia sedang mengantar makanan. Kematian Affan memicu kemarahan masyarakat, terutama di antara rekan-rekan pengemudi ojek di Jakarta. (Irfani, 2025)

Sejak malam tanggal 28 Agustus 2025, hingga keesokan harinya, mereka berkumpul di depan kantor Brimob Polri di Kwitang, Jakarta Pusat, untuk menuntut keadilan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada publik atas insiden yang melibatkan anggota Brimob dan menjanjikan penyelidikan yang transparan. Namun, kurang dari 48 jam setelah permintaan maafnya, Listyo membenarkan bahwa ia telah memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan peluru karet terhadap para pengunjuk rasa yang telah "menyerang" Markas Brimob. Peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Affan kembali menyulut seruan untuk reformasi menyeluruh terhadap kepolisian. (Irfani, 2025)

DPR RI resmi menghapus tunjangan bulanan sebesar Rp50 juta bagi seluruh anggotanya, efektif per 31 Agustus 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers pada Jumat, 5 September 2025, menanggapi tuntutan

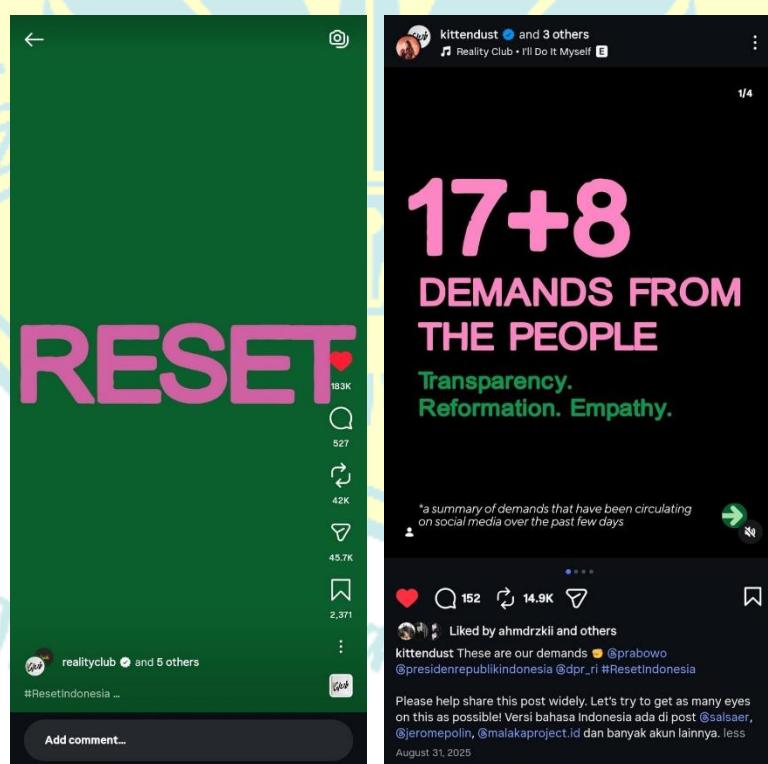
populer 17+8 Tuntutan Rakyat. Keputusan ini sekaligus memperbarui pernyataan sebelumnya dari Sufmi Dasco, yang pada 26 Agustus mengindikasikan bahwa tunjangan tersebut hanya akan dibayarkan kepada anggota DPR mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Pengumuman ini muncul sehari setelah aksi protes terhadap pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR. Menanggapi aksi protes yang berakhiri ricuh di Gedung DPR pada Senin, 25 Agustus 2025, Ketua DPR Puan Maharani mengimbau semua pihak untuk "saling menghormati dalam menyampaikan aspirasi." Ia juga menyatakan bahwa DPR akan mempertimbangkan semua aspirasi publik dan saran untuk perbaikan kinerjanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengimbau aparat keamanan untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat gedung DPR. (BBC News Indonesia, 2025)

Beberapa kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pengemudi ojek *online* melanjutkan aksi protes mereka menyusul demonstrasi besar yang berlangsung dari 25 hingga 31 Agustus, yang mengakibatkan 10 orang tewas di beberapa lokasi. Protes ini bertujuan untuk menekan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang diajukan oleh koalisi. Publik menilai pemerintah kurang tegas dalam menanggapi beberapa tuntutan penting. Mahasiswa, khususnya, kecewa bahwa pemerintah dan DPR belum membentuk tim

penyelidikan khusus atas dugaan makar dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat selama demonstrasi 25-31 Agustus di beberapa daerah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membicarakan bahwa tanda-tanda makar terlihat selama demonstrasi tersebut. Sementara, beberapa tuntutan lain masih belum terpenuhi, seperti reformasi kepolisian dan desakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali ke barak. Prabowo juga menyatakan bahwa beberapa tuntutan protes dapat dibenarkan. Namun, ia mengakui bahwa tuntutan lainnya masih perlu dibahas dan diperdebatkan lebih lanjut. (CNN Indonesia, 2025)

Gambar 1.1

Postingan 17+8 Tuntutan Rakyat di Media Sosial



Sumber: Akun *Instagram* @kittendust

(Diakses pada 21 November 2025)

Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" diartikan sebagai upaya menyimpulkan kerohanian sekaligus menyoroti pentingnya perjuangan masyarakat sipil melawan pemerintah. Dukungan sejumlah tokoh politik dan selebritas semakin berkembang. Negara memiliki waktu hingga 5 September 2025 untuk menanggapi 17 tuntutan jangka pendek dan hingga 31 Agustus 2026 untuk menanggapi delapan tuntutan jangka panjang. Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI, menegaskan bahwa lembaganya akan menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul dan ramai diperdebatkan di media sosial menyusul akibat aksi protes di berbagai daerah. Sufmi Dasco mencatat bahwa tuntutan-tuntutan ini juga disampaikan oleh beberapa perwakilan mahasiswa dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) di DPR. Ia menyatakan bahwa DPR selalu mengumpulkan aspirasi rakyat dalam RDP yang diadakan oleh komisi-komisinya. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR beberapa waktu lalu, ia menyatakan bahwa perwakilan DPR telah berencana untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa, akan tetapi, pada saat hendak bertemu, tindakan yang dilakukan tidak lagi sekadar sekadar ekspresi aspirasi. (Lyandra, 2025)

Proses publikasi dalam sebuah berita terdapat proses *gatekeeping* yang dilakukan oleh pekerja media. *Gatekeeping* adalah proses mengubah dan menggabungkan sejumlah besar informasi ke dalam format pesan terbatas yang dapat diterima oleh setiap individu, dan merupakan bagian penting dari fungsi kerja media dalam

masyarakat *modern*. (Shoemaker & Vos, 2009:1). *Gatekeeper* menentukan apa yang membentuk suatu realitas sosial individu serta pandangan dunia seorang individu. Meskipun keputusan *gatekeeper* mungkin tampak tidak penting, baik informasi yang mempunyai berbagai bentuk maupun yang umum, menjadikan proses *gatekeeping* rumit dan sangat penting untuk dilakukan. (Shoemaker & Vos, 2009:3)

Indra Pahlevi selaku Biro Pemberitaan DPR RI, dalam acara menyoroti peran penting jurnalisme positif dalam mendirikan citra DPR di mata masyarakat. Survei Kompas menunjukkan bahwa kepercayaan warga terhadap DPR semakin meningkat meskipun belum mencapai level tertinggi. Indra Pahlevi mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR telah meningkat lebih dari 12% sejak survei terakhir. Namun, masih ada tantangan dalam menjaga kepercayaan itu. Indra tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi DPR dalam menjaga citra positif di mata masyarakat. Menurutnya, ada beberapa momen yang dapat merusak kepercayaan publik. Namun ia cukup yakin bahwa citra DPR dapat ditingkatkan dengan kerja keras dan komunikasi yang baik. (Sekretariat Jenderal, 2024)

Biro Pemberitaan Parlemen memiliki sejumlah potensi untuk meningkatkan citra positif lembaga. Akses ke berbagai saluran media, termasuk media sosial memungkinkan penyebarluasan informasi yang lebih luas. Hubungan yang terjalin dekat dengan media massa juga merupakan kelebihan untuk memastikan penyebarluasan informasi yang

lebih signifikan mengenai berita positif DPR RI. Tim yang ahli dalam bidang jurnalistik dan hubungan masyarakat turut berperan sebagai kekuatan yang memungkinkan Biro Pemberitaan Parlemen untuk mengatur informasi berita secara efektif membangun narasi yang relevan. (Akbar et al., 2023)

Panduan Biro Pemberitaan Parlemen dalam mengikuti dokumen rencana yang ada untuk melaksanakan tugas dan perannya adalah Renstra Deputi Persidangan yang dilakukan melalui Rancangan Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) adalah pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2022 hingga 2024 yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja antara kepala unit eselon II kepada Deputi Persidangan setiap awal tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem pendukung di Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam hal ini Deputi Persidangan, dibidang keterbukaan informasi, maka indikator spesifik dari rencana kerja Biro Pemberitaan Parlemen adalah dalam manajemen pelayanan publik, yang mencakup standar layanan, budaya pelayanan yang baik, penilaian kepuasan terhadap layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023:13)

Saat ini masyarakat sangat terus-menerus untuk mencari informasi, dengan adanya keberadaan media yang menjadi penyalur informasi, maka kebutuhannya dapat terpenuhi. Media yang dapat

diakses dengan cepat dan mudah menjadi pilihan utama. Di antara berbagai media di era digital, media *online* dianggap paling efektif. Media *online* memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah situs berita surat kabar versi daring. Artinya, informasi yang ada di media daring bersumber dari surat kabar dan media lainnya. Ada pula situs berita daring milik stasiun radio. Hal ini artinya berita di radio juga dapat diakses melalui layanan *streaming*. Selanjutnya, situs berita *online* murni yang tidak memiliki hubungan dengan media cetak maupun elektronik tidak saling berkaitan. Ada pula situs indeks berita yang hanya menampilkan tautan berita dari situs berita lain. Situs tersebut tidak membuat berita sendiri, melainkan hanya menyalin berita dari media daring lain. (Ramadhani et al., 2021)

Biro Pemberitaan Parlemen bagian penerbitan memiliki portal beritanya sendiri untuk melaksanakan tugasnya dengan nama E-Media. E-Media DPR RI merupakan pusat pemberitaan parlemen yang dikelola secara resmi dan langsung dibawah Biro Pemberitaan Parlemen. E-Media DPR RI menjadi pergabungan web terhadap bidang-bidang yang berada dibawahnya, seperti konten dari MeTakSos, konten dari TVR Parlemen, dan konten dari Media Penerbitan. Masyarakat dapat mengakses web E-Media dengan mudah, yaitu dengan mencari emedia.dpr.go.id sehingga masyarakat akan mengetahui berita-berita dan isu terbaru mengenai DPR. (Kompas.com, 2024)

Hal tersebut juga dinyatakan oleh redaktur media cetak, berinisial AH. AH menyatakan bahwa kemunculan E-Media menjadi media aggregator untuk berita-berita yang berada di *website* DPR RI. Pernyataan tersebut berdasar pada wawancara pra-riset yang dilakukan tanggal 16 Juni 2025, dijelaskan sebagai berikut:

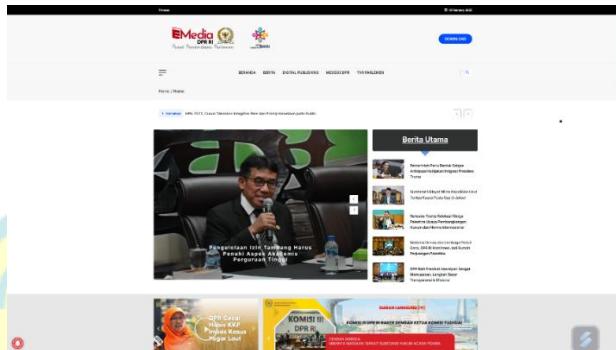
“Awalnya kemunculan itu karena pengen bikin semacam media aggregator untuk berita-berita yang ada di *website* dpr.go.id.” (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, kemunculan E-Media DPR RI awalnya untuk menjadi media aggregator sebagai yang dikelola oleh bagian penerbitan. Berita-berita yang dipublikasikan di E-Media adalah berita yang ada di situs DPR RI. E-Media berfokus pada pemberitaan, sedangkan situs DPR RI fokusnya seperti media lembaga.

“Jadi itu memang tupoksi pengelolaan *website* emedia.dpr.go.id itu ada di bagian penerbitan, tapi isinya semua itu dari kami, jadi mereka itu sifatnya cuman *me-relay* atau *mirroring* lah ya yang ada di *website* DPR ditaruh lagi lah di E-Media. Karena setahu saya itu awalnya pengennya bikin media aggregator gitu”. (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025)

Publikasi berita yang dilakukan oleh E-Media merupakan hasil *mirroring* dari situs DPR RI. Berita-berita yang ada di E-Media memiliki isi yang sama karena terkait tugasnya sebagai media aggregator dan media pengumpul dari *platform-platform* yang ada dibawah Biro Pemberitaan Parlemen.

Gambar 1.2
Tampilan Website e-media.dpr.go.id



Sumber: <https://emedia.dpr.go.id/>
(Diakses pada 11 Februari 2025)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, terdapat tampilan website dari e-media.dpr.go.id yang menjadi media yang digunakan oleh Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam beranda pada portal berita E-Media akan menampilkan berita-berita ter-update mengenai parlemen yang dibagi menjadi berbagai bidang sesuai dengan isi berita yang diunggah, bagian tengah terdapat tampilan kolom suara yang terakses pada aplikasi Spotify Radio Parlemen dan juga foto berita yang akan terakses pada media sosial DPR RI, dan bagian bawah dari portal berita merupakan informasi mengenai penerbitan bulletin dan majalah.

Terdapat perbedaan terhadap portal berita E-Media dengan portal berita lainnya. E-Media sendiri berada dibawah Sekretariat Jenderal DPR RI yang di mana khusus untuk membahas seputar parlemen sehingga berita yang dikeluarkan seputar dengan kegiatan DPR RI. Berita yang unggah dalam portal web dapat berisikan pendapat dari para Anggota DPR yang biasanya didapat dalam

wawancara, pendapat saat rapat berlangsung, acara kunjungan, serta beberapa dari berita berasal dari internal yang tidak disebarluaskan media luar.

"Itu ini kan media internal, house media lah media internal sifatnya juga media lembaga jadi fungsi-fungsinya itu lebih ke fungsi kehumasan sebenarnya begitu". (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025)

Perbedaan E-Media dengan media lain juga bisa dilihat berdasarkan jawaban wawancara pra-riset oleh AH. Pada E-media cenderung menampilkan berita-berita mengenai anggota DPR karena fungsinya lebih mengarah ke fungsi kehumasan. Itulah sebabnya berita yang ditampilkan berada pada kacamata anggota dewan.

Untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, khususnya selama sidang paripurna, membahas perundang-undangan, kunjungan daerah, dan kegiatan lainnya yang seluruh kegiatan membutuhkan komunikasi yang baik. Anggota dewan sudah harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik untuk memenuhi tanggung jawab mereka, terutama jika mengacu pada kata "Parlemen" yang berasal dari bahasa Prancis, "Parle" adalah berbicara. Oleh karena itu, sebagai anggota dewan harus orang-orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Seharusnya tidak diragukan lagi bahwa setiap anggota dewan adalah komunikator yang keterampilannya telah terbukti di lapangan. (Efriza, 2018)

Banyaknya informasi negatif bahkan berita palsu menempatkan Biro Pemberitaan Parlemen dalam posisi kritis untuk memberikan tanggapan yang efektif dan segera guna menjaga citra lembaga tersebut. Bila terjadi berita negatif atau palsu, Biro Pemberitaan Parlemen akan melapor kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan pimpinan DPR RI terkait kemudian meminta pimpinan atau anggota DPR untuk memberikan penjelasan atau posisi, yang kemudian akan dirumuskan dalam *press release* Biro Pemberitaan Parlemen. Hal ini disebabkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen bekerja layaknya Hubungan Masyarakat (Humas) DPR RI yaitu tidak berwenang untuk menyampaikan pendapatnya atas nama lembaga DPR RI. Sesuai hukumnya, anggota DPR RI yang memegang fungsi speaker. (Akbar et al., 2023)

Untuk mengunggah suatu berita membutuhkan proses yang panjang, mulai dari *plotting* berita, masuk ke proses *gatekeeping*, hingga memasukin ke pengunggahan konten berita. Proses awalnya adalah berita-berita yang didapatkan oleh redaktur akan di dilakukan *plotting* ke reporter dan fotografer sesuai jadwal rapat berita. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pra-riset sebagai berikut:

“Jadi kan setelah ada agenda muncul tiap hari itu ke saya nanti saya *plotting* reporternya. Nanti yang redaktur foto juga *plotting* fotografernya. Nanti dari masing-masing selama mengikuti rapat, mau wawancarai kalau perlu wawancarai, atau hanya mengambil statement yang selama ada anggota di selamat rapat ya nanti reporter atau petugas peliputan itu membuat laporan,

buat artikel berita gitu. Nanti dikirim ke *email*, *email* redaktur, setelah itu saya sunting atau saya *edit*, setelah saya *edit* bersih, habis itu langsung saya *upload* ke portal *website* begitu". (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Hasil dari pra-riset menunjukkan reporter yang telah mendapatkan jadwal akan menunggu di ruang rapat sampai rapat selesai dilaksanakan. Untuk setiap reporter memiliki bentuk laporan yang berbeda sesuai dengan apa yang diambil ketika rapat, jika laporan membutuhkan wawancara, maka reporter akan mewawancarai anggota DPR, namun bila tidak, laporan hanya membutuhkan *statement* yang anggota DPR katakan saat rapat. Hasil laporan akan dikirimkan ke *email* redaktur, lalu redaktur akan melakukan *editing* sampai bersih. Jika sudah bersih maka berita tersebut siap untuk diunggah ke portal berita *website*.

"Kalau berita ini kan tulisan artikel ya atau isu. Kalau tulisan artikel ya penyelesiannya reporter mengirimkan bahan sampai ke tangan redaktur atau *editor* seperti saya, jadi redaktur itu sama aja sih. Ya sampai di tangan saya itu kami seleksi, kami perhatikan kira-kira udah rapi dan bahannya itu memang cocok untuk masuk ke *website* kita, tidak merugikan DPR juga jadi kita cukup hati-hati juga sih untuk isu ini kan gitu ya udah langsung naik saja, *so far* sih tidak tidak terlalu rumit sih". (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Proses penyeleksian atau *gatekeeping* yang dilakukan oleh *gatekeeper* E-Media DPR RI sesuai dengan hasil wawancara pra-riset menunjukkan bahwa kurang lebih sama seperti media lain. Berita dikirimkan dari reporter atau jurnalis ke redaktur untuk dilakukan penyeleksian. Diteliti lagi apakah berita yang dikirimkan sudah sesuai

dengan dan layak untuk masuk ke website E-Media dengan mempertimbangkan sisi kehumasan.

Proses penyeleksian berita atau proses *gatekeeping* yang dilakukan dalam produksi berita berada pada satu *layer*, yaitu pada redaktur. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh AH mengenai proses *gatekeeping* sebagai berikut:

“Jadi memang *gatekeeping*-nya itu ketika untuk berita, saya bisa bilang hampir untuk *daily activity* itu hanya satu *layer*, itu saya sendiri. Dan saya dibantu sama teman saya juga. Kecuali kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya ada permintaan rilis dari pimpinan DPR atau pimpinan Sekretariat Jenderal itu biasanya akan berkoordinasi dengan atasan saya begitu. Kepala sub-bagian atau kepala bagian”. (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Proses penyeleksian berita hanya melewati satu *layer* atau satu proses saja, yaitu terjadi pada redaktur. Publikasi berita dilakukan setiap hari sesuai dengan agenda pemberitaan media yang telah ditentukan. Untuk publikasi berita yang dilakukan karena suatu urgensi tertentu akan membutuhkan koordinasi dengan atasan mengenai berita yang akan dipublikasikan. Berita yang ditampilkan oleh E-Media harus mengandung kinerja Anggota DPR dengan harapan dapat meningkatkan citra publik mengenai Anggota DPR.

Dukungan terhadap berbagai pihak yang terkait untuk mencapai konvergensi media biro pemberitaan parlemen agar E-Media dapat mencapai audiens dari majalah atau bulletin parlementaria, penonton dari program televisi dan radio parlemen, analisis dari media cetak dan

media sosial, serta aplikasi yang terkait pemberitaan tentang DPR RI dan peningkatan minat masyarakat dalam mengakses informasi mengenai DPR RI serta mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat melalui *platform* digital yang akurat, relevan dan terpercaya.

Tabel 1.1
Jumlah Pembaca E-Media

No.	Sasaran Program	Indikator Kerja	Tahun	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Pemberitaan DPR RI	Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	2022	150.000 Pengunjung	153.000 Pengunjung (102%)
			2022	250.000 Pengunjung	340.000 Pengunjung (136%)
			2023	300.000 Pengunjung	2.579.156 Pengunjung (859,7%)

Sumber: Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas terdapat perbandingan jumlah pembaca E-media dari tahun ke tahun. Data diatas terlihat perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam renstra telah tercapai. Hal ini menunjukkan pendekatan manajemen program yang efektif, seperti desain *interface*, kecepatan koneksi, dan perlindungan data penggunanya sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, selain itu, *platform*

ini menawarkan konten yang relevan, bermanfaat, dan menghibur yang meningkatkan keterlibatan pengguna dan membangun kepercayaan terhadap E-Media DPR RI. *Platform* ini menyediakan informasi yang akurat dan faktual yang membuhi kebutuhan masyarakat. (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024)

Gatekeeping yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan model Shoemaker dan Reese yang terdiri dari lima level, yaitu level individual, level rutinitas sosial, level organisasi media, level kelembagaan sosial, dan level sistem sosial. Pada level individual menyangkut latar belakang *gatekeeper*, seperti karakteristik demografi, pendidikan, pekerjaan sebelumnya, dan lainnya. Melalui wawancara pra-riset yang dijalani, terdapat latar belakang oleh *gatekeeper*, yaitu sebagai berikut:

“Saya kerja hampir mau 5 tahun, tapi saya baru jadi redaktur sekitar 2 tahunan ini, sebelum itu saya memang jadi reporter disini. Statusnya saya PNS”. (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Hasil wawancara pra-riset diatas menunjukkan bahwa terdapat latar belakang yang dapat diambil adalah jenis pekerjaan sebelumnya yang *gatekeeper* lakukan. Sebelumnya, *gatekeeper* adalah seorang jurnalis selama 3 tahun, dan sekarang adalah seorang redaktur jalan 2 tahun. Keduanya memiliki relevansi, yaitu sama-sama bekerja dibagian media hanya berbeda caranya, jurnalis sebagai pengambil berita dan redaktur sebagai orang yang memilih kelayakan berita.

Untuk level kedua, yaitu level rutinitas media, dapat berupa metode dan rutinitas tetap yang dilakukan pekerja media. Melalui wawancara pra-riset, terdapat hasil yang menunjukkan jumlah berita yang diunggah oleh E-Media DPR RI setiap harinya. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

“Mungkin sehari bergantung ya kalau masa sidang, mungkin bisa di atas 30 artikel, tapi kalau lagi masa reses seperti ini mungkin bisa 10 atau di bawah 10 artikel, nggak terlalu banyak”. AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa rutinitas unggahan setiap harinya terdapat 30 artikel pada hari biasa dan 10 atau di bawah 10 artikel pada masa reses. Alasan artikel yang diunggah saat masa reses sedikit karena jarang dilakukannya rapat karena para anggota DPR Kembali ke daerah pilihannya masing-masing.

Level ketiga pada model ini adalah level organisasi. Pada level ini dapat mencakup peraturan, kebijakan, dan lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau media. Melalui hasil pra-riset, ditemukan adanya bahasan mengenai peraturan atau kriteria yang berlaku dalam proses *gatekeeping*, sebagai berikut:

“Pertama, keterbaruanya, isu masih baru, komentar anggotanya masih relevan, komentarnya signifikan terhadap fungsi lembaga ini, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran.” (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Penjabaran mengenai fungsi lembaga diatas menjadi proses *gatekeeping* atau bagaimana berita dapat dikatan layak untuk

dipublikasikan ke E-Media. Layaknya sebagai jurnalis pada umumnya, dalam memilih berita harus sesuai dengan keterbaruan.

Jadi selama ada signifikansi dari ketiga tugas utama perlemen DPR itu ya maka kita putuskan itu layak. Kalau nggak ada ya, itu nggak layak." (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Pemberitaan yang dilakukan harus adanya signifikansi dari ketiga fungsi dari DPR RI baru pemberitaan dapat dipublikasikan. Pemberitaan mencakup setidaknya salah satu fungsi dari DPR RI baru berita tersebut layak untuk dipublikasikan. Dalam keterkaitan dengan fungsi legislasi, berita yang ditampilkan membahas mengenai aturan-aturan yang dilanggar. Dalam fungsi pengawasan, berita yang ditampilkan membahas tentang kinerja pemerintah yang diawasi oleh DPR. Yang terakhir adalah pemberitaan mengenai fungsi penganggaran.

Level keempat pada model ini adalah level kelembagaan sosial. Level ini membahas bagaimana pengaruh luar memiliki dampak pada media tersebut. Melalui hasil pra-riset, level ini masih sedikit memiliki keterkaitan dengan level organisasi. Level kelembagaan sosial pada pemberitaan E-Media mengarah kepada media humas yang menampilkan kinerja positif dari DPR RI.

"Ya, heavy to anggota DPR legislator. Karena saat ini pandangannya kita ingin istilahnya mungkin menampilkan kinerja anggota dewan ke publik. Jadi kita tonjolkan aktor utama, narasumber utama, emang anggota DPR. Kalo ada narasumber dari lain, misalnya mitra kerja DPR itu pasti kita tulis di belakang lah ya. Jadi *background* atau material story-nya. Begitu". (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Hasil pra-riset yang telah dilakukan menghasilkan bahwa ada beberapa berita yang fokusnya lebih ke umum, namun banyaknya mengarah ke kinerja anggota DPR RI karena produksi berita E-Media DPR RI layaknya media humas yang menampilkan kinerja dari DPR RI. Berita-beritanya menitikberatkan pada kinerja dari DPR RI. Namun, bila terdapat sumber lain maka akan dicantumkan sumber tersebut dibelakang.

Level terakhir pada model ini adalah level sistem sosial. Level sistem sosial membahas mengenai sub-sistem yang ada, yaitu politik, budaya, ekonomi, dan ideologi. Level ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konten media. Melalui pra-riset ditemukan faktor yang mempengaruhi isi konten berita, yaitu sebagai berikut:

“Ya, tentunya berita yang kita tentukan yang sekiranya signifikan dan mampu memboost citra dan kinerja positif kedewanan pada sisi kehumasan”. (AH, wawancara Pra-Riset pada 16 Juni 2025).

Pembahasan mengenai penentuan isi berita pada hasil pra-riset menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi isi berita ada pada tujuan dari media tersebut. Dalam konteks E-Media, berita yang sekiranya cocok dan diperkirakan dapat meningkatkan citra dari DPR RI dapat lolos untuk diunggah ke portal website. Berita-berita yang lolos harus memikirkan sisi kehumasan.

1.2 Identifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait gatekeeping dalam produksi

berita E-Media Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai isu 17+8 tuntutan rakyat periode bulan Agustus hingga Desember tahun 2025:

1. Terdapat perbedaan penekanan dalam penentuan *angle* berita mengenai isu 17+8 Tuntutan Rakyat, seperti kebijakan apa yang dilakukan oleh DPR RI dalam menanggapi isu ini. Hal ini menunjukkan adanya proses *gatekeeping* yang dipengaruhi oleh citra lembaga.
2. Adanya kebijakan organisasi membuat redaksi lebih berhati-hati dalam mengangkat isu 17+8 Tuntutan Rakyat karena masuk ke dalam isu sensitif.
3. Kriteria nilai berita yang digunakan dalam ruang redaksi bersifat jurnalistik, namun masih melalui pertimbangan kepentingan organisasi dikarenakan E-Media tergolong media lembaga yang dibuat sebagai *support system* kedewanan.

1.3 Keunikan Penelitian

Keunikan pada penelitian ini ada pada objek penelitian, media yang digunakan, teori yang digunakan, dan model penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *gatekeeping* dalam produksi berita E-Media DPR RI mengenai isu 17+8 Tuntutan Rakyat. Berdasarkan keunikan yang sudah disebutkan, maka akan dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan isu 17+8 Tuntutan Rakyat. 17+8 Tuntutan Rakyat adalah 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang diajukan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

2. Media Yang Diteliti

Media yang diteliti pada penelitian ini adalah media *online* E-Media milik Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada E-Media, yang diteliti berupa produksi berita yang dikeluarkan melalui proses *gatekeeping*.

3. Teori *Gatekeeping*

Penelitian ini menggunakan Teori *Gatekeeping*. *Gatekeeping* adalah proses mengubah dan menggabungkan sejumlah besar informasi ke dalam format pesan terbatas yang dapat diterima oleh setiap individu, dan merupakan bagian penting dari fungsi kerja media dalam masyarakat modern.

4. Model Penelitian *Gatekeeping* Hierarki Pengaruh Shoemaker dan Reese

Model penelitian yang digunakan adalah model Teori *Gatekeeping* Hierarki Pengaruh Shoemaker dan Reese yang mencakup lima level, yaitu level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level kelembagaan sosial, dan level sistem sosial.

1.3 Fokus Penelitian

Kenaikan anggaran kepada anggota Parlemen menimbulkan amarah publik karena publik merasa kinerja yang dilakukan oleh parlemen tidak sebanding dengan gaji yang ditetapkan. Hal ini membawa kepada demo yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2025 hingga membawa kepada isu 17+8 Tuntutan Rakyat yang merangkum keresahan yang terjadi kepada masyarakat.

Pembahasan yang telah dijabarkan pada latar belakang sebelumnya telah menjelaskan bagaimana proses penyusunan dan penyampaian berita di E-Media DPR RI. Dalam konteks media lembaga negara, proses *gatekeeping* sangat krusial karena berhubungan dengan integritas lembaga dan cara pesan dari lembaga ke publik. Berdasarkan permasalahan diatas, maka mendapatkan fokus penelitian, yaitu bagaimana proses *gatekeeping* dalam produksi berita E-Media DPR RI mengenai isu 17+8 Tuntutan Rakyat.

1.4 Tujuan Penelitian

Pemberitaan yang dilakukan oleh E-Media adalah seputar kegiatan dari DPR RI dan mengarah kepada peningkatan citra positif dari DPR RI. Penelitian ini akan membahas bagaimana suatu informasi dipilih, disaring, disusun, dan disampaikan kepada khalayak khususnya untuk E-Media yang merupakan media lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *gatekeeping* dalam produksi berita E-Media DPR RI mengenai isu 17+8 Tuntutan Rakyat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Akademis

Hasil penelitian dapat mengembangkan kajian Ilmu Komunikasi mengenai jurnalistik media, khususnya mengenai tentang pengetahuan rutinitas yang dijalankan oleh media lembaga, seperti keputusan yang dapat mempengaruhi media tersebut dalam mempublikasikan berita. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi oleh peneliti selanjutnya terkait penelitian menggunakan konsep *gatekeeping*.

2. Manfaat Penelitian Praktisi

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi Ilmu Komunikasi, khususnya jurnalistik, pengelola media, praktisi media, dan mahasiswa Ilmu Komunikasi lainnya mengenai proses *gatekeeping* dan diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap transparansi kepada pihak-pihak serta instansi terkait.

Intelligentia - Dignitas